



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

---

Tahun Sidang	: 2021- 2022
Masa Persidangan	: V
Rapat	: Ke - 4 (Empat)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen EBTKE diwakili Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power dan Dirut PT Sorikmas Mining
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 23 Mei 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan kejadian kebocoran sumur gas PT Sorik Marapi Geothermal Power pada bulan April 2022</li><li>2. Penjelasan kejadian insiden longsor di wilayah kerja PT Sorikmas Mining</li><li>3. Upaya penanggulangan dan pencegahannya</li><li>4. Lain-lain</li></ol>
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE</li><li>2. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI</li><li>3. Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power</li><li>4. Dirut PT Sorikmas Mining</li></ol> <p>B. 40 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:</p> <p>20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik</p> <p>20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual</p> <p>12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin</p>

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 23 Mei 2022 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Penjelasan kejadian kebocoran sumur gas PT Sorik Marapi Geothermal Power pada bulan April 2022
  - b. Penjelasan kejadian insiden longsor di wilayah kerja PT Sorikmas Mining
  - c. Upaya penanggulangan dan pencegahannya
  - d. Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dilanjutkan oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman, ST, Fraksi Partai Golkar

## II. KESIMPULAN RAPAT

### A. KESIMPULAN RDP KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI DAN PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER

1. Berdasarkan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan PT Sorik Marapi Geothermal Power telah ditemukan bahwa:
  - a. Telah terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengeboran berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI yang akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 30 Mei 2022.
  - b. Tidak menggunakan diverter sesuai dengan kaidah pengeboran yang benar.
  - c. Telah terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang dan 50 warga menjalani perawatan pada tanggal 25 Januari 2021, kebakaran di wilayah kerja perusahaan pada tanggal 14 Mei 2021 (tidak ada korban), serta 20 orang warga dan 2 orang pekerja menjalani perawatan di RS karena terjadi *blow out* di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022.

- d. Belum ada realisasi kompensasi kerugian kepada masyarakat terkait peristiwa *blow out* di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022.
  - e. Akibat beberapa kejadian kecelakaan kerja di PT Sorik Marapi Geothermal Power menyebabkan terganggunya iklim investasi dikarenakan terjadinya kekhawatiran masyarakat di daerah yang berpotensi menghasilkan energi panas bumi.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk segera melakukan pemeriksaan secara komperhensif terhadap seluruh peralatan teknis dan infrastruktur yang digunakan di wilayah kerja PT Sorik Marapi Geothermal Power dan segera menyampaikan laporannya kepada Komisi VII DPR RI.
  3. Komisi VII DPR RI mendesak manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk segera merealisasikan kompensasi terhadap warga yang terdampak insiden *blow out* di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022 sebesar kurang lebih Rp500 juta/orang.
  4. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk melakukan perhitungan kerugian dari kerusakan lingkungan terutama lahan yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat dengan memberikan proyeksi tingkat produktivitas lahan tersebut di masa mendatang.
  5. Dalam rangka untuk membangun iklim investasi yang sehat dan tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja untuk masyarakat sekitar dan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan, maka Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power di Kabupaten Mandailing Natal mengingat insiden kebocoran gas H<sub>2</sub>S pada sumur milik PT Sorik Marapi Geothermal Power sudah terjadi berulang kali dan menimbulkan korban.
  6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022.

## **B. KESIMPULAN RDP KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI DAN PT SORIKMAS MINING**

1. Berdasarkan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT Sorikmas Mining telah ditemukan bahwa:
  - a. PT Sorikmas Mining sudah mendapatkan izin kontrak karya (KK) selama 24 tahun tetapi belum melakukan aktivitas produksi.
  - b. PT Sorikmas Mining sudah melakukan aktivitas penelantaran kontrak karya (KK) seluas 201.600 hektar tanpa adanya kegiatan produksi.
  - c. Telah terjadi kegiatan illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan akibat penelantaran kontrak karya (KK) PT Sorikmas Mining.
2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha di seluruh wilayah Indonesia.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang ada di wilayah izin usaha pertambangan, misalnya dengan pemberian rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun pembentukan koperasi-koperasi.
4. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, maka Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining mengingat dalam kurun waktu 24 tahun pihak perusahaan belum melakukan kegiatan produksi apapun.
5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorikmas Mining untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB

Jakarta, 23 Mei 2022

**KETUA RAPAT,**

**DIRJEN MINERBA  
KEMENTERIAN ESDM RI**

**RIDWAN DJAMALUDDIN**

**MAMAN ABDURRAHMAN, ST**

**332**

**DIREKTUR PANAS BUMI  
DITJEN EBTKE**

**HARRIS, S.T., M.T.**

**DIREKTUR UTAMA  
PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER**

**RIZA PASIKKI**

**DIREKTUR UTAMA  
PT SORIKMAS MINING**

**BOYKE POERBAYA ABIDIN**